Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian *Justice Collaborator* Sebuah Tindak Pidana Tertentu

Mar'ie Mahfudz Harahap, Reski Anwar
FSH UINSU Medan
mariemahfudz@uinsu.ac.id

Abstract

Justice collaborators are very much needed by law enforcement in uncovering certain criminal acts. The fact is that in the formulation of the justice collaborator arrangement in the law, especially the problem of determining the main actor, there are still many juridical problems that have an impact on its application and implementation. This research is classified into normative legal research (normative juridical), using primary legal materials and secondary legal materials. The approach used is a statutory approach to review all relevant rules and regulations. In this study, we will discuss the problem of legal arrangements related to the provisions for determining the provision of a justice collaborator for a particular crime, and the juridical problem of determining the main actor in the provision of a justice collaborator for a particular crime. The findings in this study indicate that there is no juridical definition of the main actors who cause legal problems at the level of norms and practice. The next finding is the difference in perception and the unclear determination of authority to determine the main actors between law enforcers which results in legal uncertainty.

Keywords: *Juridical Problems, Main Actor, Justice Collaborator, Certain Criminal acts.*

Ringkasan

Adanya kerjasama antara pelaku dengan negara sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum (APH) dalam mengungkap berbagai tindak/perbuatan pidana tertentu. Faktanya pada formulasi pengaturan *justice collaborator* yang ada dalam undang-undang, khususnya masalah menentukan pelaku utama masih terdapat banyak permasalahan yuridis yang menimbulkan dampak dalam aplikasi dan penerapannya. Penelitian ini tergolong ke dalam riset hukum yang normatif (yuridis normatif), riset menggunakan bahan hukum primer disertai bahan hukum sekunder. Suatu pendekatan perundang-undangan digunakan pada penelitian ini guna menganalisis semua norma-norma terkait. Dalam penelitian ini akan membahas masalah mengenai pengaturan hukum terkait ketentuan penentuan pemberian *justice collaborator* sebuah tindak pidana tertentu, dan permasalahan yuridis penentuan pelaku utama dalam pemberian *justice collaborator* sebuah tindak pidana tertentu. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya definisi yuridis tentang pelaku utama yang menimbulkan permasalahan hukum dalam tataran norma dan praktik. Temuan selanjutnya adalah Perbedaan persepsi dan penentuan kewenangan yang tidak jelas untuk menentukan pelaku utama antara para penegak hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Kata kunci: Permasalahan Yuridis, Pelaku Utama, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Tertentu

A. Pendahuluan

Tindak pidana juga sering disebut dengan istilah delik yang diterjemahkan dari bahasa latin oleh para sarjana dari kata *delictum*. Beberapa sarjana telah menerjemahkan

secara bahasa istilah *strafbaar Feit/delictum* keberbagai peristilahan antara lain, pertama tingkah laku yang bisa dihukum, kedua peristiwa pidana, ketiga perbuatan pidana, dan keempat dikenal dengan sebutan tindak

pidana.¹ Moeljatno memberikan definisi dari perbuatan pidana (*delictum*) sebagai perbuatan/*feit* yang dilarang oleh undang-undang dan diancamkan dengan pidana/hukuman barangsiapa yang melanggar larangan itu.² Rimmelink mengakui terkait penggunaan *strafbaar feit* yang digunakan di Indonesia cukup membingungkan seperti antara “perbuatan pidana” dengan “tindak pidana”, keduanya sama dalam makna, namun tergantung pada aliran atau universitas mana yang menggunakannya.³

Tindak pidana/delik (*delictum*) dimaksudkan untuk setiap tingkah laku (*feit*) yang tercela atau patut dicela yang apabila dilanggar akan menimbulkan kerusakan bagi benda hukum atau suatu kepentingan hukum. Akibat sifat tercela atau patut dicelanya suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan tersebut, maka oleh perumus undang-undang diformulasi kepada norma-norma dalam undang-undang yang di dalamnya perbuatan tersebut dilarang dan apabila dilanggar diancamkan hukuman/sanksi/pidana bagi para pelanggar. Adapun yang dimaksud sebagai tindak pidana tertentu adalah yang mencakup terminologi yang dimaksudkan oleh Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Jo. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat menjadi “UU PSK”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4

Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *justice collaborator* (JC) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu selanjutnya disingkat menjadi “SEMA ini”

Adapun terkait SEMA ini adalah sebuah regulasi yang hadir guna melengkapi aturan yang belum lengkap terkait *Justice Collaborator* (JC) sebagai pedoman untuk Hakim dan Pengadilan. SEMA ini telah mengandung esensi dari hukum internasional yang disepakati berbagai negara.⁴

Tindak pidana tertentu atau selanjutnya disebut dengan kejahatan tertentu dalam pengertian Undang-Undang PSK diantaranya pelanggaran berat hak asasi manusia, perbuatan korupsi, *money laundering*, terorisme, *human trafficking*, tindak pidana narkoba dan psikotropika dan *sexual crimes against children*. Di sisi lain, menurut SEMA ini, tindak pidana tertentu merupakan kejahatan berat seperti korupsi, *terrorism*, narkoba, *money laundering*, *Human trafficking*, dan *organized crime* lainnya, yang merupakan problem dan bahaya serius bagi stabilitas keamanan publik. Ancaman terhadap *collapse of institutions, and democratic values, ethic and justice, and sustainable development and rule of law*. SEMA ini menetapkan jenis dan kriteria di atas yang termasuk dalam jenis

¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2002, hlm. 204-207

² Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 121

³ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2021, hlm. 69

⁴ Reza Fitra Ardhian, Winarno Budyatmojo, *Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Bentuk Penghargaan Untuk Saksi Pelaku (Justice Collaborator)*, Jurnal Recidive, Vol. 6. No. 1, 2017, hlm. 70

kejahatan tertentu yang disebutkan dalam uraian di atas.

Setiap tindak pidana memiliki pelaku sebagai subjek yang melakukan tindak pidana. Di sini pelaku diposisikan sebagai motor penggerak agar terealisasinya sebuah kejahatan/tindak pidana/delik. Artinya bahwa suatu delik tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku. Dalam hal ini kedudukan pelaku dalam sebuah delik adalah penting dan vital. Oleh sebab itu kedudukan pelaku dalam hukum pidana juga tidak kalah pentingnya dari kedudukan tindak pidana itu sendiri.

Pasal 55 KUHP tidak memberikan definisi yuridis terkait definisi pelaku tindak pidana, namun menurut MvT apa itu pelaku adalah setiap orang (*person*) yang melakukan/menimbulkan akibat (*impact*) yang memenuhi rumusan delik, sementara menurut Jonkers pelaku sebatas orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang serupa dan memenuhi unsur delik, yang dimaksud hanya pelaku materil saja.⁵

Tindak pidana apabila hanya dilakukan oleh seorang saja atau satu pelaku saja tentu akan sangat mudah menentukan siapa pelaku utama dari suatu tindak pidana tersebut, dikarenakan seluruh perbuatannya baik secara fisik atau materil dan de, rencana, niat, kehendak, motif tentunya hanya dimiliki oleh satu orang saja. Namun di sisi lain suatu delik yang dilakukan bersama oleh banyak orang atau dikenal dengan istilah penyertaan/turut

serta (*deelneming*) menimbulkan kerumitan tersendiri dalam menentukan siapa pelaku utama dalam suatu tindak pidana/delik tersebut.

Kerumitan dalam menentukan pelaku/aktor utama dalam sebuah delik yang pelakunya beberapa orang sering ditemukan dalam praktik penegakan hukum pidana. Akibat kerumitan dalam menentukan seorang pelaku utama tak jarang menimbulkan kebingungan dan penafsiran yang berbeda antara para penegak hukum sehingga menimbulkan permasalahan hukum baik secara dogmatik maupun praktik. Sebagai contoh, Salah satu permasalahan hukum terkait menentukan pelaku utama dapat dilihat dalam kasus Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dimana terdapat perselisihan cara pandang antara hakim Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan pelaku utama sehingga berimbas pada pembatalan pemberian keringanan hukuman melalui sarana *justice collaborator* (JC) kepada para terdakwa Irman dan Sugiharto.⁶ *Justice collaborator* untuk selanjutnya disebut sebagai JC diartikan sebagai saksi pelaku suatu kejahatan yang secara sukarela bekerjasama dengan penegak hukum.⁷ JC juga merupakan *status, condition* yang didapatkan seseorang tersangka/terdakwa dalam mempertahankan guna memperoleh hak-hak konstitusionalnya di depan hukum.⁸

⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, hlm 50

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3721620/status-justice-collaborator-2-terdakwa-e-ktp-ditolak-pt-dki>, diakses tanggal 9 April 2022

⁷<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan->

perlindungan-hukumnya/, diakses tanggal 9 April 2022

⁸ Tiffany Harmelia, Handri Wirastuti Sawitri, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Pembatalan Status Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, S.L.R, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm 118.

Ditemukannya kesenjangan (*gap*) seperti penjelasan di atas menunjukkan adanya masalah dalam formulasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain juga terlihat terjadi permasalahan dalam tataran formulasi, aplikasi dan penerapan undang-undang di dalam praktik acara pidana. Umumnya menurut Barda masalah yuridis hanyalah suatu masalah perumusan atau formulasi yang dilihat dari kebijakan formulasi yang berlaku, namun selanjutnya menurut Barda dapat pula dilihat dari sudut pragmatik apabila tidak dapat diterapkannya suatu peraturan disebabkan ada kekurangan menurut sistem yang seharusnya.⁹ Hal ini yang dimaksud sebagai permasalahan yuridis dalam penelitian ini, yang mana akan dibahas dengan rinci dan mendalam. Berdasarkan dari penjabaran di atas, tentunya perlu dilakukan analisis hukum terkait menentukan pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Untuk itu artikel ini ditulis guna melihat bagaimana pengaturan hukum terkait ketentuan penentuan pemberian *justice collaborator* sebuah tindak pidana tertentu?, dan bagaimana permasalahan yuridis penentuan pelaku utama dalam pemberian *justice collaborator* sebuah tindak pidana tertentu?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini digunakan untuk memberi jawaban-jawaban secara yuridis apabila terjadi kekosongan hukum, kekaburan, hambatan, dan perselisihan peraturan.¹⁰ Bahan hukum primer penelitian ini, yakni segala jenis peraturan perundang-

undangan yang membahas mengenai pelaku utama dalam tindak pidana; sedang bahan hukum sekunder, yakni yang memberi penerangan pemahaman terhadap bahan primer yang ada, meliputi semua buku dan artikel ilmiah yang berbicara mengenai pelaku utama dalam suatu tindak pidana dan rancangan undang-undang. Untuk teknik melengkapi dan merumuskan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Terkait Penentuan *Justice Collaborator*

UU PSK mengatur saksi pelaku yang mengungkap fakta dalam kesaksiannya terhadap delik yang dikerjakannya dapat menerima penghargaan berupa:¹¹

- a. Keringanan menjatuhkan pidana/*sanction*

Dalam penghargaan ini seorang JC masih pada tahap sebelum putusan, artinya masih dapat dimintakan agar pidana lebih ringan dijatuhkan pada saat persidangan saksi pelaku tersebut. Keringanan dalam penjatuhan pidana menurut Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa untuk menimbang sebuah ringan dan beratnya seseorang dijatuhi pidana, hakim harus menimbang perilaku baik (*good*) dan jahat (*evil*) dari terdakwa, artinya bahwa hakim dalam memutuskan suatu berat ringannya pidana (*strafmaat*) harus menimbang dan memperhatikan sifat pada diri terdakwa. Meninjau secara mendalam

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm 72

¹⁰ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019

¹¹ Lihat Pasal 10 A UU No. 31 Tahun 2014

maksud Pasal 8 UU Kehakiman di atas menunjukkan hakim harus sungguh-sungguh dan berperan aktif dalam memahami kondisi terdakwa. Hakim secara filosofis juga dituntut untuk memikirkan dan mempertimbangkan karakteristik sifat yang ada dalam diri pelaku, apakah itu perilaku baik maupun buruk yang ada pada diri pelaku.

Untuk masalah saksi pelaku yang mengungkapkan suatu tindak pidana tertentu, hakim juga wajib memberikan keringanan dalam penjatuhan pidana disebabkan penghargaan yang diberikan negara disebabkan saksi pelaku tersebut mau mengungkapkan secara teras dan jelas dalam kesaksiannya terhadap suatu tindak pidana tertentu. Agar mendapatkan *reward* dalam bentuk lebih ringan dalam penghukumannya seperti yang dituangkan dalam Pasal 10 A ayat(3) huruf a UU PSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) memberikan rekom dalam bentuk tertulis kepada penuntut umum untuk dimasukkan ke dalam nota tuntutan kepada hakim pada saat sidang. Pada rekom tersebut berisi pertimbangan mengapa pelaku layak untuk mendapat penghargaan (*reward*) berupa pengurangan hukuman yang nantinya akan diputus oleh majelis hakim pada saat akhir persidangan.

b. Pembebasan bersyarat/pidana percobaan, remisi tambahan, dan hak narapidana (*napi*) lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Dalam hal ini penghargaan yang diterima seorang JC pasca putusan dibacakan. Artinya saksi pelaku telah

menjalani masa pidana disebabkan perkaranya telah diputus oleh pengadilan. Hak-hak narapidana akan diperoleh selama masa saksi pelaku menjalankan masa hukuman yang dijatuhkan. Untuk mendapatkan *reward* berupa hak napi seperti dituangkan pada Pasal 10A ayat(3) huruf b UU PSK, LPSK memberi rekom dalam bentuk tersurat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rekom yang diberikan berisi pertimbangan mengapa pelaku layak untuk mendapat penghargaan (*reward*) dalam bentuk pengurangan masa hukuman, berupa remisi tambahan, pembebasan bersyarat, dan hak-hak lain terkait yang nantinya akan diberikan oleh Menteri terkait kepada terpidana.

Penghargaan di atas dapat diberikan kepada JC oleh UU. UU Perlindungan Saksi dan Korban menentukan tindak pidana tertentu adalah sebagai berikut.

- a. pelanggaran berat hak asasi manusia,
- b. *Corruption*,
- c. *money laundering*,
- d. *terrorism*
- e. *human trafficking*,
- f. tindak pidana narkoba dan psikotropika dan
- g. *sexual crimes against children*.

Adapun jenis tindak pidana tertentu dan pedoman pemberian penghargaan tersebut oleh Mahkamah Agung diatur secara lebih jelas dalam SEMA ini. SEMA ini menguraikan apa saja yang terdiktomi ke dalam jenis tindak pidana tertentu yang mana JC hanya dapat diberikan oleh hakim untuk saksi pelaku yang ditentukan, yakni:

- a. *serious crime, such as corruption, terrorism, drug crime, money laundering and human trafficking*,

- b. *other crimes of an organized crime nature.*
- c. *has caused serious problems and threats to the security and social defence so that institutions undermine democratic values, ethics and justice, and*
- d. *dangerous for sustainable development and the rule of law.*

selanjutnya, SEMA ini juga memberikan pedoman bagi hakim untuk menentukan kriteria dan kelayakan untuk dijadikan sebagai JC. Dalam SEMA tersebut agar dapat menjadi JC harus memenuhi kriteria yang ditentukan antara lain:

- a. merupakan satu dari sekian orang pelaku
Artinya bahwa pelaku harus menjadi satu dari sekian pelaku dalam sebuah delik tertentu yang telah ditentukan oleh SEMA ini. Dengan kata lain harus masuk kedalam kriteria Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*).
- b. Mengakui kejahatan yang dilakukannya
Pengakuan perspektif hukum pembuktian dikenal dengan istilah *confessions evidence*. Mengenai pengakuan ada yang dilakukan di luar dan dalam persidangan. Pengakuan yang dipaparkan dalam persidangan adalah sebuah bukti yang superior dan terbaik (*perfect evidence*).¹² Syarat ini serupa dengan sebutan alat bukti yang dahulu diketahui dalam HIR yang disebut “pengakuan tertuduh”. Menurut Yahya Harahap kata “pengakuan” dirasa sungguh berisi pernyataan apa yang dikerjakan oleh pelaku.¹³ Pengakuan di sini menekankan pada terdakwa untuk mengakui kejahatan yang dilakukannya,

tanpa pengingkaran atas perbuatan yang telah dilaksanakan..

- c. Tidak sebagai pelaku utama kejahatan yang diungkapkan
Pedoman ini menentukan bahwa seorang JC tidak boleh kedudukannya dalam sebuah tindak pidana yang dikerjakan sebagai pelaku utama. Namun baik UU PSK maupun SEMA yang ada tidak menentukan lebih jauh terkait syarat dan kriteria sebagai pelaku utama
- d. menyampaikan keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan.
Setelah memenuhi seluruh kriteria sebelumnya, maka seorang JC harus mengutarakan kesaksiannya dalam proses persidangan tindak pidana tertentu yang dia beberkan sebagai JC. Setelah memberikan kesaksian, nantinya dalam proses perkara pidana seorang JC, JPU pada nota tuntutananya kepada JC menyatakan bahwa JC tersebut telah mengungkap dan memberi kesaksian dan bukti-bukti yang mendukung dan signifikan oleh karenanya penyidik dan/atau penuntut umum mampu menguak delik yang ada secara efektif, mennguak para pelaku yang lain yang memiliki kontribusi lebih banyak dan/atau berkontribusi me *recovery aset* hasil suatu tindak pidana.

Dari pedoman pemberian JC di atas, sesuai kedudukan dan fungsi sebuah surat edaran, maka hendaknya seluruh jajaran hakim di bawah lingkup Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dengan baik apabila ada saksi pelaku yang ingin menjadi

¹² Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm 90

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan*

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 318

JC dapat mempertimbangkan kelayakannya sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila orang-orang yang dikategorikan JC diharapkan kepada para hakim agar dapat memberikan keringan pidana. Keringan pidana dapat diperoleh apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang dapat meringankan hukuman atau lebih dikenal dengan *mitigating circumstances*, maksudnya seluruh fakta dan kondisi sebagai pertimbangan mendasar diringkannya pidana/*sanction*.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas, bekerjasamanya pelaku untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukannya adalah salah satu bentuk dari alasan yang memperingan hukuman. SEMA ini mengatur masalah keringan pidana atas disebabkan peran dan andil JC, hakim dalam menimbang pidana nantinya akan diberikan pada JC dapat memilih untuk memberi *sanction* sebagai berikut:

- a. memberi hukuman percobaan dengan syarat tertentu (khusus); dan/atau
- b. Memberi hukuman dalam bentuk penjara yang lebih mudah diantara pelaku-pelaku lainnya yang telah dibuktikan bersalah dalam perkara terkait.

2. Permasalahan Yuridis Dalam Pemberian *Justice Collaborator*

Permasalahan yuridis yang dimaksud merupakan suatu permasalahan yang ditemukan dalam undang-undang, dimana terdapat satu pasal atau beberapa pasal yang memiliki kerancuan dan kesalahan dalam perumusan yang bertentangan dengan tataran teori dan norma-norma lain yang terkait,

sehingga menimbulkan dampak dalam tataran formulasi, aplikasi, dan penerapan hukum pidana. JC dalam formulasinya di Indonesia menimbulkan beberapa kerancuan yang menimbulkan beberapa permasalahan yuridis, diantaranya.

a. Terkait untuk menentukan “pelaku utama”

Bukan sebagai “pelaku utama” menjadi syarat untuk menjadi seorang JC. Namun istilah pelaku utama tidak disebutkan satupun oleh UU. Adapun mengenai istilah “pelaku” dan pembagiannya, Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur dengan cukup jelas dalam pembahasan mengenai penyertaan (*deelneming*).

Macam-macam pelaku yang melakukan tindak pidana diatur pada Pasal 55, 56 KUHP yang menjabarkan terkait penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana. Pasal 55 dan 56 KUHP memberikan pembagian terkait penyertaan. KUHP membedakan penyertaan menjadi dua jenis, antara lain:¹⁵

1) Pembuat (*dader*) diatur di Pasal 55 KUHP

Pembuat terdiri dari:

a) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku (*pleger*) menurut Pompe ialah seorang yang memiliki keharusan untuk mengakhiri kondisi terlarang itu. Pelaku juga dapat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan dengan dirinya perbuatan memenuhi rumusan delik. Untuk itu dapat dipahami bahwa pelaku (*pleger*) yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah pelaku tunggal

¹⁴ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam*

Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No.1, 2018, hlm 90-91

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Op.Cit, hlm 50-59

atau yang berbuat yang melengkapinya rumusan delik secara sendiri.

b) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan kejahatan melalui perantara orang lain, yang orang lain di sini dipersamakan layaknya alat. Pada *doenpleger* ada beberapa kriteria, yakni pertama alat yang digunakan adalah manusia (*human*), kedua alat yang digunakan “melakukan perbuatan” (bukanlah alat mati atau tak bernyawa), ketiga alat yang dipakai itu tidak mampu bertanggungjawab sendiri/tidak cakap.

c) Yang turut serta (*medepleger*)

Menurut *Memori van Toelichting* seseorang turut serta melakukan ialah orang yang dengan kehendak sengaja ikut melakukan atau bersama melaksanakan terjadinya sesuatu. Syarat adanya *medepleger* ada dua, yakni pertama ada kerjasama secara sadar (*bewustesamenwerking*), dan yang kedua adanya pengerjaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*)

d) Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah subjek yang mendorong/menggerakkan subjek lain untuk mengerjakan delik dengan memanfaatkan cara yang ditetapkan oleh UU.¹⁶ Penganjur hampir sama dengan “yang

menyuruh melakukan”, namun pembuat materiil (*auctor physicus*) dalam “penganjur” harus dapat/mampu bertanggung jawab dalam hukum pidana sementara dalam “yang menyuruh melakukan” tidak.

2) Pembantu (*Medeplichtige*) diatur di Pasal 56 KUHP

Pembantu (*Medeplichtige*) bersifat *accessoir*, maksudnya agar ada sebuah *medeplichtige* seyogianya terdapat seseorang yang mengerjakan perbuatan utamanya (harus ada pelaku yang dibantu).

Apabila dicermati dengan baik, terdapat beberapa perbedaan yang menentukan kualitas perbuatan seorang pembuat (*dader*) tindak pidana dianggap lebih memiliki sifat patut dicela daripada perbuatan seorang pembantu (*medeplichtige*). Adapun yang menjadi pembeda antara lain sebagai berikut:

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 59

Pembuat (<i>dader</i>)	Pembantu (<i>medeplichtige</i>)
Perbuatan merupakan perbuatan pelaksanaan (<i>uitvoeringshandeling</i>)	Perbuatannya hanya merupakan perbuatan membantu/menunjang (<i>ondersteuningshandeling</i>)
Kesengajaannya merupakan hanya untuk memberi bantuan (<i>animus socii</i>)	Kesengajaannya diarahkan untuk terwujudnya suatu delik (<i>animus coauctores</i>)
Terjadi pada delik pelanggaran tidak dijatuhi dipidana (<i>sanction</i>) (Pasal 60 KUHP)	Pada delik dengan kualifikasi kejahatan dan pelanggaran dapat dijatuhi dipidana (<i>sanction</i>)
Maks pidana sesuai dengan yang diancamkan pada delik	Maksimum pidana dikurangi sepertiga (Pasal 57 Ayat (1) KUHP)

Dari pemaparan di atas terkait penyertaan dibagi dalam dua garis besar, hal ini sejalan dengan ajaran Boehmer pada abad ke-18 yang menetapkan ada dua kelompok peserta (*deelnemers*) suatu delik, yang pertama dikenal dengan sebutan *causa physica*, artinya orang-orang yang berbuat kejahatan dan hasil/akibat tersebut memang diinginkan. Sementara yang kedua dikenal sebagai *causa moralis*, yang perannya sebagai peserta tidak langsung (*gehilfe*).¹⁷ Namun, Pasal 55 dan 56 KUHP membagi baik dari jenis peran, kualitas, maupun kuantitas peran pelaku dalam sebuah tindak pidana seperti penjabaran di atas terkait pelaku sebuah tindak pidana. Namun dalam pasal tersebut tidak ditentukan secara

eksplisit yang mana sebagai pelaku utama dan yang mana yang bukan pelaku utama. Untuk itu jika melihat pada KUHP maka tidak akan menemukan cara atau metode yang sah secara yuridis untuk menentukan suatu kedudukan yang mana sebagai pelaku utama.

Adapun mengenai defenisi apa itu pelaku utama baik KUHP, UU PSK, dan pada SEMA ini tidak memberikan defenisi yuridis terkait pelaku utama. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi hakim bahkan bagi seluruh penegak hukum dalam memberikan penilaian yang objektif untuk melihat siapa yang paling cocok disebut sebagai pelaku utama.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 353

3. Perbedaan persepsi menentukan pelaku utama antara para penegak hukum

Saksi pelaku yang hendak mengajukan diri sebagai seorang JC dapat mengalami ketidakpastian hukum saat penerimaan haknya yang diberikan oleh penegak hukum. Terkadang polisi, dan jaksa menganggap saksi pelaku layak dan memenuhi kriteria untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama, namun pada tahap proses persidangan di pengadilan hakim berpandangan lain, sehingga kedudukan saksi pelaku yang bekerjasama yang telah disepakati sebelumnya pada saat penyidikan dan penuntutan digugurkan oleh hakim. Saksi pelaku telah mengakui dan bekerjasama membuka fakta sebuah tindak pidana dalam tahapan penyidikan dan penuntutan, tetapi pada saat persidangan hakim menyatakan saksi pelaku tidak layak menjadi JC, sebab hakim menilai saksi pelaku adalah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Hal ini terjadi pada kasus Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dimana ada perbedaan pandangan antara hakim MA dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan pelaku utama, MA memandang bahwa saksi pelaku merupakan pelaku utama sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai JC, sementara KPK berpandangan bahwa saksi pelaku layak untuk menjadi seorang JC. Perbedaan antara dua instansi penegak hukum di atas berimbas pada pembatalan pemberian keringanan hukuman melalui JC kepada para terdakwa Irman dan Sugiharto, sehingga dalam vonis MA menjatuhkan

pidana penjara 15 tahun penjara lamanya dan denda 500 juta rupiah terhadap masing-masing terdakwa.¹⁸

Kasus di atas terjadi sebab definisi yuridis mengenai “pelaku utama” tidak ada dan pedoman penentuan kriteria menjadi “pelaku utama” juga tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada disharmonisasi pemahaman antara para penegak hukum yang menciptakan ketidaktentuan hukum bagi saksi pelaku yang hendak bekerjasama menguak sebuah delik/kejahatan. Disharmonisasi yang terjadi dalam praktek hukum negara Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disharmonisasi hukum, adapun faktor-faktor yang sesuai dengan permasalahan di atas, yakni faktor adanya benturan diantara kewenangan instansi penegak hukum disebabkan ada pembagian beberapa kewenangan yang tidak sistematis dan jelas.¹⁹ Dalam hal ini ada benturan antara kewenangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman dengan KPK sebagai garda awal dari penegakan hukum pemberantas korupsi yang dalam proses sebelum masuk persidangan juga menawarkan penghargaan bagi pelaku yang mau bekerjasama menjadi saksi guna menguak sebuah delik. Namun di akhir putusan terjadi benturan kewenangan disebabkan kewenangan yang tidak sistematis dan jelas, sehingga hakim menggugurkan apa yang telah dijanjikan KPK kepada terdakwa.

Terjadinya kondisi demikian memberikan dampak (*impact*) buruk bagi penegakan hukum, salah satunya ialah

¹⁸ Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 430k/Pid.Sus/2018

¹⁹ Arifah Wulandari dan Muhammad Rustamji, *Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim*

Dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-Ktp Irman Dan Sugiharto, Jurnal *verstek* Vol. 8 No.3 (September-Desember 2020), hlm. 276-277

banyak saksi pelaku yang nantinya enggan menjadi JC disebabkan contoh di atas yang tidak mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku.

4. Masalah dalam meringankan pidana kepada saksi pelaku dengan kedudukannya sebagai membantu (*medeplichtige*)

Pada SEMA ini untuk menentukan pidana (*sanction*) yang nantinya akan diberikan kepada JC, bisa dipertimbangkan untuk memberi pidana yang ringan, dengan pedoman memberikan pidana (*sanction*) dalam bentuk penjara yang paling singkat diantara para pelaku seluruhnya yang nyatanya bersalah dalam perkara yang diperiksa. Pasal 57 Ayat (1) KUHP telah menentukan pengurangan pidana kepada yang membantu (*medeplichtige*), yakni maksimum pidana dikurangi satu pertiga (1/3).²⁰ Sudah jelas pembantu (*medeplichtige*) akan dipidana lebih ringan 1/3 dari pidana maksimum, oleh karena itu sudah jelas pidana yang akan diberikan kepada pembantu (*medeplichtige*) akan jauh lebih ringan dari pelaku yang lain. Untuk itu ketentuan dalam SEMA ini khusus untuk yang membantu (*medeplichtige*) tidak tepat sama sekali. Ketidakjelasan dalam pengaturan demikian terjadi karena pembentuk undang-undang tidak cermat dalam memahami keseluruhan peraturan. Selanjutnya pentingnya badan legislasi untuk paham hakikat dari aturan hukum khususnya

hukum pidana dan sistem peradilan pidana sekarang ini. Hal ini juga terjadi sebab pembentuk peraturan kurang paham esensi peraturan hukum pidana antara satu terhadap yang lain.²¹

D. Penutup

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa definisi yuridis pelaku utama tidak diberikan oleh KUHP, Undang-Undang PSK, dan SEMA ini sehingga menimbulkan perspektif yang beragam diantara penegak hukum terkait siapa yang layak meenyandang status “pelaku utama”. Selanjutnya dalam tataran praktik terdapat Perbedaan penentuan kewenangan yang tidak jelas untuk menentukan pelaku utama antara para penegak hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi saksi pelaku yang hendak bekerjasama guna membuka suatu tabir kejahatan.

Untuk itu diperlukan sebuah gagasan guna memberi masukan untuk perkembangan ke depannya. Adapun gagasan atau saran yang ditawarkan adalah pemerintah harus segera memberikan batasan dan kriteria “pelaku utama” agar pedoman JC dapat dijalankan tanpa permasalahan. Selanjutnya diharapkan agar permasalahan penentuan apakah saksi pelaku dapat menjadi JC dapat diputuskan sesegera mungkin dalam proses peradilan untuk disepakati oleh seluruh penegak hukum agar menjamin kepastian hukum bagi saksi pelaku yang hendak bekerjasama.

²⁰ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hlm 26

²¹ Ade Adhari, *Kebijakan Formulasi Kualifikasi Yuridis terhadap Delik dalam Undang-*

Undang yang Lahir dalam Kurun Waktu 2014-2015, Jurnal Muara Ilmu Sosial, vol. 1 No. 1, 2017, hlm 27-28.

Daftar Pustaka

- Adhari, Ade, *Kebijakan Formulasi Kualifikasi Yuridis terhadap Delik dalam Undang-Undang yang Lahir dalam Kurun Waktu 2014-2015*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, vol. 1 No. 1, 2017.
- Arief, Barda Nawawi, 2015, *Sari kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Fatmawati, Nur Indah, <https://news.detik.com/berita/d-3721620/status-justice-collaborator-2-terdakwa-e-ktp-ditolak-pt-dki>, diakses 9 April 2022
- Fitra Ardhian, Reza. Budyatmojo, Winarno, *Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Bentuk Penghargaan Untuk Saksi Pelaku (Justice Collaborator)*, Jurnal Recidive, Vol. 6. No. 1, 2017.
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hananta, Dwi, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No.1, 2018
- Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harmelia, Tifanny. Wirastuti Sawitri, Handri. Perdani Yuris Puspita Sari, Dessi, *Pembatalan Status Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, S.L.R, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Hiariej, Eddy O. S, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy O. S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Moeljatno, 2018, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasek Diantha, Made, 2019, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sofian, Ahmad, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya>, diakses tanggal 9 April 2022
- Sianturi, S.R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Wulandari, Arifah dan Rustamji, Muhammad. *Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim Dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-Ktp Irman Dan Sugiharto*, Jurnal verstek Vol. 8 No.3, 2020.